

**TESIS**

**ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM KEBIJAKAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA GANRA KABUPATEN SOPPENG**

***ANALYSIS OF THE LEADERSHIP STYLE OF THE VILLAGE HEAD IN  
PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN THE GANRA VILLAGE  
GOVERNMENT OF SOPPENG REGENCY***

**ASBUDI**

**E062221010**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2024**

**ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM KEBIJAKAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA GANRA KABUPATEN SOPPENG**

***ANALYSIS OF THE LEADERSHIP STYLE OF THE VILLAGE  
HEAD IN PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN THE  
GANRA VILLAGE GOVERNMENT OF SOPPENG REGENCY***

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**

Disusun dan diajukan Oleh:

**ASBUDI**

**E062221010**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA GANRA KABUPATEN SOPPENG

Disusun dan diajukan oleh

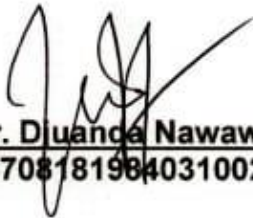
**ASBUDI**

E062221010

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **19 Januari 2024**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Duanda Nawawi., M.Si.**  
NIP 195708181964031002

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Indar, M.Si.**  
NIP 196304071989032003

Plt. Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan,



**Dr. A. M. Rusli, M.Si.**  
NIP 196407271991031001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Rhil, Sukri, S.IP., M.Si.**  
NIP 197508182008011008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asbudi  
NIM : E062221010  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul  
**ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM  
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA GANRA KABUPATEN  
SOPPENG**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain. Bahwa tesis yang saya tulis ini, benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Januari 2024

Yang menyatakan



*ASBUDI*  
ASBUDI

## ABSTRAK

ASBUDI. *Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Keterbukaan Informasi Publik pada Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ganra Kabupaten Soppeng* (dibimbing oleh Djuanda Nawawi dan Indar).

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa, kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting dan amat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kepemimpinan kepala desa memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan di desa. Desa Ganra Adalah salah satu desa yang mengikuti ajang Apresiasi Desa dalam Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2022 di bawah kepemimpinan kepala Desa Periode 2020 sampai sekarang. Desa ini telah menjadi desa percontohan dalam keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam kebijakan keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintah Desa Ganra dan mengetahui faktor yang memengaruhi gaya kepemimpinan dalam kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa Ganra. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Ganra, berdasarkan empat indikator kepemimpinan yang digunakan, yakni direktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif, Kepala Desa Ganra menerapkan keempat gaya tersebut sesuai dengan keadaan dan regulasi yang ada. Namun, kepemimpinan Kepala Desa Ganra lebih dominan menggunakan model kepemimpinan konsultatif yang dapat dilihat dari inisiatif beliau untuk memberi ruang untuk aspirasi, baik kepada staff desa maupun masyarakat. Faktor yang memengaruhi gaya kepemimpinan kepala desa dalam kebijakan keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintah Desa Ganra Kabupaten Soppeng, yakni pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan kepribadian.

Kata kunci: kepemimpinan, gaya kepemimpinan, pemerintahan desa



## ABSTRACT

*ASBUDI. An Analysis of the Leadership Style of the Village Head in Public Information Disclosure in the Government of Ganra Village of Soppeng Regency (supervised by Djuanda Nawawi and Indar Arifin)*

In the implementation of village governance, the leadership of village head is an important and decisive factor in organizing governance in the village. The leadership of village head has a major role in determining the direction of policies in village development. Ganra Village is one of the villages that participated in the Village Appreciation event in Public Information Disclosure in 2022 under the leadership of the current village head for the 2020 period. It also became a pilot village in public information disclosure in South Sulawesi Province, especially in Soppeng Regency. This study aims to analyze how the leadership of village head in the public information disclosure policy in the implementation of the government of Ganra Village and find out the factors affecting the leadership style in the Public Information Disclosure Policy in Ganra Village. The research method used was qualitative research, and the data collection techniques are interview, observation, and documentation. The results show that in Ganra Village, there are four leadership indicators used, namely directive, consultative, participative, and delegative indicators. The Ganra Village Head applies the four styles in accordance with the existing conditions and regulations, but the leadership of the Ganra Village Head is more dominant in using the consultative leadership model. It can be seen from the initiative to provide space for aspirations to the village staff and the community. The factors affecting the leadership style of the village head in the Public Information Disclosure Policy in the the government of Ganra Village of Soppeng Regency are knowledge, ability, experience, and personality.

Keywords: leadership, leadership style, village government



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ganra Kabupaten Soppeng**” Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar magister (S2) pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidaklah mudah dan tidak dalam waktu yang singkat. Selama penyusunan tesis ini, penulis menemukan berbagai hambatan dan tantangan, namun hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat tekad yang kuat, segala upaya dan usaha yang keras serta tentunya dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda **Umar** dan Ibunda **Samsia** yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis hingga sampai seperti saat ini. Terima Kasih tak terhingga karena telah memberikan segala dukungan yang luar biasa kepada penulis. Baik berupa kasih sayang, dukungan moral dan materi, semangat

sertadoa yang tak pernah ada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara kandung Staurina, Samsul, Nasrudin dan Jumarni yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, melimpahkan rezeki serta kebahagiaan yang tak henti kepada beliau. Aamiin. Terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S2 Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Phil Sukri M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Dr. A.M Rusli M.Si, selaku ketua jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Bapak Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Indar, M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hingga tesis ini selesai.
4. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan Tesis ini. Prof. Dr. Phil Sukri M.Si, Dr. A.M Rusli M.Si,, dan Dr. A. Lukman Irwan, M.Si.
5. Pemerintah Kabupaten Soppeng yang telah memberikan izin untuk



melakukan penelitian di Desa Ganra Kecamatan Ganra. Terkhusus untuk pihak yang terlibat dalam penelitian sehingga penulis dapat dengan mudah mendapatkan data untuk menyelesaikan Tesis ini, dalam hal ini seluruh staf pemerintahan di Desa Ganra.

6. Terima kasih kepada Indra Saputra Jaya, S.Pd, M.Pd, M.Yusuf.K.S.E., M.E, Nursandi Marsuni, S.E yang telah menjebak saya untuk melanjutkan pendidikan S2 dan Teman-teman yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan apapun serta memberikan dorongan dan dukungan dalam menuntaskan proses Penyelesaian tesis ini.
7. Terima Kasih Kepada Keluarga Besar yang selalu memanjatkan doa serta semangat kepada penulis untuk tetap kuat dalam menyelesaikan Pendidikan magister ini.
8. Terima Kasih Kepada teman-teman penulis Magister Ilmu pemerintahan Angkatan 2022 yang selalu kebersamai dan menjadi pencerah dalam segala pikiran kritis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga amal kebajikan semua pihak

yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Makassar, 19 Januari 2024

Asbudi

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Teori Kepemimpinan.....	13
2.2. Gaya Kepemimpinan.....	26
2.3. Desa dan Pembangunan.....	29
2.4. Penelitian Terdahulu.....	41
2.5. Kerangka Pikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
3.2. Tipe Penelitian.....	44
3.3. Informan Penelitian.....	45
3.4. Sumber Data.....	46
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6. Deskripsi Fokus Penelitian.....	47
3.7. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV Hasil dan Pembahasan.....	52
4.1. Gambarann Umum Lokasi Penelitian.....	52

4.2. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam kebijakan keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan Pemerintahan .....	56
4.2.1. Gaya Kepemimpinan Direktif .....	58
4.2.2. Gaya Kepemimpinan Konsultatif .....	64
4.2.3. Gaya Kepemimpinan Partisipatif .....	70
4.2.4. Gaya Kepemimpinan Delegatif .....	76
4.3. Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik .....	89
4.3.1. Pengetahuan.....	89
4.3.2. Skill/Kemampuan.....	92
4.3.3. Pengalaman .....	95
4.3.4. Kepribadian .....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
5.1. Kesimpulan.....	103
5.2. Saran.....	104

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

1. Tingkat Pendidikan di Desa Ganra.....	53
2. Keadaan Ekonomi Desa Ganra .....	54
3. Struktur Pemerintah Desa Ganra.....	55
4. Nama Kepala Desa Ganra .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Kepemimpinan dianggap sangat penting karena dua alasan. pertama adalah fakta bahwa kinerja suatu unit, instansi atau organisasi seringkali dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan. Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan, termasuk proses kepemimpinan di semua tingkatan organisasi, serta keterampilan dan perilaku pemimpin yang relevan. Menurut Cattel (dalam Salusu, 2015) menjelaskan bahwa pemimpin adalah orang yang menciptakan perubahan yang paling efektif dalam kinerja kelompoknya.

Kepemimpinan diambil dari asal kata pemimpin yang artinya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efektif dan efisien. Kepemimpinan merupakan suatu bentuk dominasi yang didasari oleh kapabilitas / kemampuan pribadi, yaitu mampu mendorong dan mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan bersama. Salah satunya adalah pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat adalah tingkat Desa.

Menurut Rivai (dalam Sulistio dan Sulistiowati, 2015), pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk menggerakkan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pemimpin tidak bekerja sendiri untuk mencapai tujuan organisasinya, tetapi harus dibantu orang lain

dalam hal ini anggotanya, untuk itu pemimpin harus dapat menciptakan suasana yang kondusif di lingkungannya sehingga menghasilkan efisiensi kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disisi lain pemimpin harus menyatu dengan bawahan namun wibawa sebagai seorang pemimpin harus tetap dijaga. Aktualisasi seorang pemimpin adalah menciptakan suasana dan pola kepemimpinan dan diharapkan para bawahan. Model kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, karena model kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan dengan tingkat kematangan anak buah.

Persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Peran masyarakat dan sektor swasta merupakan kunci penting dalam mengembangkan demokrasi. Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan berpendapat serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sarana utama bagi suatu negara, sektor swasta dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu membangun demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Lamangida, Akbar, and Hasan 2017. Hal 2).

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan dalam

prakteknya berhubungan langsung dengan masyarakat. Di kantor desalah masyarakat mengurus KTP, masalah tanah dan memusyawarahkan urusan-urusan publik dan sebagainya dengan kata lain didesalah ujung tombak pelayanan publik. Kinerja Kepemimpinan yang sesungguhnya dari seorang kepala desa beserta aparat kemudian akan diterimanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa, kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting dan amat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kepemimpinan kepala desa memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan di desa. Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga desa serta penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintahan desa, kepala desa itu dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa sebagai unsur staf dan kepala dusun sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerja tertentu.

Kepemimpinan kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan yang ada di desa berdasarkan kebijakan yang telah di tetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang berada di desa dengan dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan kewajibannya. kepemimpinan kepala desa sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat mengetahui



kewajiban dalam pembangunan desa, dalam hal ini tertuang dalam undang-undang No. 6 pasal 2 Tahun 2014 yaitu: pemerintah desa sebagaimana dimaksud kepala desa dan perangkat desa sebagai aktor penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut Thoha (Fathoni,dkk 2018. Hal 15) )Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkup desa memiliki aspek-aspek kepribadian khas/gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat mencoba . Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh banyak hal, yang salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut.Pemimpin yang sukses adalah apabila pemimpin tersebut mampu menjadi pencipta dan penggerak bagi bawahannya dengan menciptakan suasana kerja yang dapat memacu pertumbuhan dan mampu mengembangkan anggotanya serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan kepala desa erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan desa. Oleh karena itu, perilaku kepemimpinan kepala desa selalu dihubungkan dengan kegiatan kepala desa dalam mengarahkan, memotivasi, menggerakkan anggotanya untuk mewujudkan tujuan pemerintahan desa.Perilaku kepala desa selaku pemimpin yang harus melaksanakan fungsi kepemimpinan di desa, diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pemimpin pemerintahan di desa dalam melayani kepentingan masyarakat.

Gaya kepemimpinan kepala desa merupakan upaya yang dilakukan

kepala desa dalam menggerakkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan, kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan juga merupakan faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan publik. Namun sebelum melakukan pembangunan kepala desa terlebih dahulu mengumpulkan informasi dan melakukan musyawarah dengan masyarakat agar dapat mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini kepala desa dan masyarakat membuat keputusan secara bersama-sama. Keberhasilan atau kegagalan pembangunan desa dapat ditentukan dari beberapa hal, salah satunya adalah dengan gaya kepemimpinan yang dijalankan kepala desa tersebut. Pemimpin dapat dikatakan sukses apabila pemimpin dapat menggerakkan bawahan dan dapat menciptakan suasana kerja yang dapat memacu pertumbuhan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, kepemimpinan kepala desa selalu dihubungkan dengan kegiatan kepala desa dalam memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan tujuan dari pemerintah desa.

Perilaku kepemimpinan kepala desa selalu dihubungkan dengan kegiatan kepala desa dalam mengarahkan, memotivasi, menggerakkan anggotanya untuk mewujudkan tujuan pemerintahan desa. Perilaku kepala desa selaku pemimpin yang harus melaksanakan fungsi kepemimpinan di desa, diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pemimpin pemerintahan di desa dalam melayani kepentingan masyarakat dan bagaimana menerapkan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa yang membantunya untuk mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat, tugas utama yang harus ditempuh pemerintah desa adalah bagaimana cara untuk mengembangkan prinsip keterbukaan informasi kepada publik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenang dan berkeadilan. Pemerintahan desa diharapkan harus mampu mengembangkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, undang-undang ini memberikan wacana dan paradigma baru dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip keterbukaan.

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian disebut dengan UU Desa telah memberikan keleluasaan kepada desa

untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Posisi pemerintahan desa dalam struktur pemerintah merupakan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan mewujudkan kemajuan desa dan kemajuan masyarakat harus dikawal dan dikelola dengan baik, salah satunya dengan mendorong keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Transparansi dalam pengelolaan pemerintahan akan meningkatkan tanggungjawab pemerintah serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebagaimana dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya berdasarkan atas asas keterbukaan”. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 24 huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa yang dimaksud keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri memerlukan informasi untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Informasi berguna dalam pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya dihormati. Konstitusi Indonesia telah memuat dasar

pemenuhan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi yaitu Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi maka perlu adanya keterbukaan informasi, khususnya informasi yang bersifat publik. Keberadaan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, maka segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan seharusnya diketahui oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik wajib diterapkan oleh setiap badan publik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut dengan UU KIP.

Sukses Penyelenggaraan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di pemerintahan khususnya tingkat Desa Tidak akan terlepas dari kepemimpinan kepala Desa Dalam mengarahkan semua struktural keanggotaan ditingkat desa agar masyarakat dapat memperoleh informasi. Salah satu Desa Yang menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik adalah Desa Ganra Kabupaten soppeng. Berdasarkan peraturan Bupati

soppeng Nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Soppeng.

Hasil pencapaian dalam mengimplementasikan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin dari keluaran yang dihasilkan. Kinerja kepala desa merupakan salah satu alat ukur bagi pencapaian tujuan organisasi pemerintahan desa. Karena kinerja dapat dipandang sebagai “thing done”. A. A. Hasibuan dan M. Hasibuan, (2019. Hal 24); Nizar & Hasibuan juga mengartikan kinerja (prestasi kerja) sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

(Keban, 2004) kinerja aparatur desa merupakan hal yang penting dan perlu mendapat perhatian yang cukup dalam rangka untuk meningkatkan dan perbaikan kualitas pelayanan masyarakat desa. Penilaian terhadap kinerja kepala desa dan aparatur desa akan sangat berguna untuk melihat atau menilai kuantitas, kualitas, pekerjaan yang efektif dan efisiensi dalam Pengimplementasian Kebijakan.

Desa Ganra adalah salah satu Desa diantara Lima Desa di kabupaten Soppeng Yang Termasuk dalam indeks Desa Membangun (IDM) yang dikategorikan sebagai Desa Mandiri Pada Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan kelebihan Desa dalam indeks ketahanan social, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan Lingkungan atau Ekologi. Selain itu, Desa Ganra Adalah salah satu desa yang berhasil mengimplementasikan kebijakan

keterbukaan informasi publik yang mewakili provinsi sulawesi selatan dalam ajang Apresiasi Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2022 dibawah kepemimpinan kepala Desa Periode 2020- sekarang. Serta menjadi desa percontohan dalam keterbukan informasi publik di provinsi sulawesi selatan khususnya di Kabupaten Soppeng. Hal itu tidak terlepas dari kemampuan Dari peran kepala Desa sebagai pemimpin dan sebagai teladan buat bawahnya Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengarahkan bawahan dan stafnya dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah Kabupaten Soppeng.

Hal Tersebut didukung oleh Bass (dalam Nuradhawati, 2015: 2) yang menyatakan bahwa kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai factor terpenting dari keberhasilan atau kegagalan organisasi, baik yang berorientasi bisnis maupun publik. Berhasil atau tidaknya organisasi tersebut biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpinnya.

Dari Hasil pengamatan dilapangan kendala tentunya dalam pengimplmentasian kebijakan keterbukaan informasi public dalam penyelenggaraan desa masih ada kendala yang dihadapi yaitu desa dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik didesa yaitu adanya faktor penghambat yaitu komunikasi, Sumber daya Manusia, serta masyarakat yang masih belum paham mengenai pentingnya kebijakan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka judul penelitian dalam penelitian ini adalah “ **Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa**

## **dalam Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ganra Kabupaten Soppeng”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam kebijakan Publik pada Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ganra Kabupaten Soppeng?
2. Apa Faktor yang Mempengaruhi Gaya kepemimpinan Kepala Desa Dalam Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ganra Kabupaten Soppeng?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan gaya kepemimpinan kepala desa dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ganra Kabupaten Soppeng.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam penerapan gaya kepemimpinan kepala desa dalam kebijakan keterbukaan informasi publik pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ganra Kabupaten Soppeng.



#### **1.4. Manfaat Penelitian**

yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, pada khususnya dalam kajian Kepemimpinan pemerintahan dan Implementasi Kebijakan
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan perbaikan struktur organisasi pemerintahan khususnya dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka ini merupakan uraian konsep teori yang akan menjadi landasan untuk melakukan penelitian ini. Adapun yang dimaksud adalah konsep teori tentang Kepemimpinan, Gaya Kepemimpinan dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

#### **2.1. Teori Kepemimpinan**

##### **1. definisi Kepemimpinan**

Definisi kepemimpinan juga berbeda ketika kita mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan. Didefinisikan secara luas, kepemimpinan akan melibatkan proses mempengaruhi penetapan tujuan organisasi, mendorong perilaku pengikut untuk mencapai tujuan tersebut, dan mempengaruhi tim dan budaya. Hal ini juga mempengaruhi menjelaskan peristiwa kepada pengikut, mengatur kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, menjaga hubungan kerjasama dan kerja tim, dan mendapatkan dukungan, dan kerjasama dari orang-orang di dalam atau di luar organisasi. Konsep kepemimpinan merupakan dasar untuk analisis proses dan dinamika dalam sebuah organisasi. Karena itu, sebenarnya banyak penelitian dan diskusi yang membahas definisi kepemimpinan yang membingungkan.

Menurut Katz dan Kahn (B 2012. Hal 4) definisi lain dari kepemimpinan dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama: “sebagai atribut atau kelengkapan dari suatu kedudukan, sebagai karakteristik seseorang, dan sebagai kategori perilaku”. Di atas segalanya, gagasan tentang atribut jabatan atau

kepemimpinan secara keseluruhan dikemukakan oleh Janda (Harianto, 2014 . Hal 7) sebagai berikut. Kepemimpinan adalah jenis khusus dari hubungan kekuasaan yang didefinisikan oleh asumsi anggota kelompok bahwa salah satu anggota kelompok diberdayakan untuk menentukan pola perilaku yang terkait dengan kinerja mereka sebagai seorang pemimpin. Seorang anggota grup seperti dicatat oleh (Kunandar, 2009), pemimpin adalah agen perubahan dan mereka yang bertindak untuk mempengaruhi orang lain lebih dari orang lain mempengaruhi diri mereka sendiri. Sehubungan dengan ketiga interpretasi ini, (Mulyasa, 2013) menyatakan bahwa Kepemimpinan terdiri dari anggota kelompok yang berbeda yang dapat dengan jelas dibedakan dari anggota lain dalam hal perilaku, sifat, individu, pemikiran, atau struktur kelompok. saya mengklaim Karena definisi kepemimpinan mencakup karakteristik, perilaku, dan posisi individu dalam suatu kelompok, pemahaman ini tampaknya menyatukan tiga kategori pemikiran secara keseluruhan. Sekelompok kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

## **2. Teori Kepemimpinan**

Teori-teori dalam kepemimpinan pada umumnya menunjukkan perbedaan karena setiap teoritikus mempunyai segi penekanannya sendiri yang dipandang dari aspek tertentu. Berikut dibawah ini merupakan Teori-Teori dalam Kepemimpinan:

### **a. Teori Sifat**

Teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau cirri-ciri yang dimiliki pemimpin itu.

Atas dasar pemikiran tersebut, timbul anggapan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil, sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Dan kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri didalamnya. Ciri-ciri ideal yang perlu dimiliki pemimpin menurut Sondang P Siagian (Syam, 2018, Hal 56) adalah:

- 1) Pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, obyektivitas, pragmatism, fleksibilitas, adaptabilitas, orientasi masa depan;
- 2) Sifat Inkuisitif, rasa tepat waktu, rasa kohesi yang tinggi, naluri lerevensi, keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang antisipatif, kesediaan menjadi pendengar yang baik, kapasitas integrative;
- 3) Kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang, analitik, menentukan skala prioritas, membedakan yang urgen dan yang penting, ketrampilan mendidik, dan berkomunikasi secara efektif. Walaupun Teori Sifat memiliki berbagai kelemahan ( antara lain: terlalu bersifat deskriptif, tidak selalu ada relevansi antara sifat yang dianggap unggul dengan efektivitas kepemimpinan) dan dianggap sebagai teori yang sudah kuno, namun apabila kita renungkan nilai-nilai moral dan akhlak yang terkandung di dalamnya mengenai berbagai rumusan sifat, ciri atau perangai pemimpin justru sangat diperlukan oleh kepemimpinan yang menerapkan prinsip keteladanan.

## b. Teori Perilaku

Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok kearah pencapaian tujuan. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai deskripsi perilaku:

- 1) **Konsiderasi dan struktur inisiasi Perilaku** seorang pemimpin yang cenderung mementingkan bawahan memiliki ciri ramah-tamah, mau berkonsultasi, mendukung, membela, mendengarkan, menerima usul, dan memikirkan kesejahteraan bawahan, serta memperlakukannya setingkat dirinya. Disamping itu terdapat pula kecenderungan perilaku pemimpin yang lebih mementingkan tugas organisasi.
- 2) **Berorientasi kepada bawahan dan produksi Perilaku** pemimpin yang berorientasi kepada bawahan ditandai oleh penekanan pada hubungan atasan-bawahan, perhatian pribadi pemimpin pada pemuasan kebutuhan bawahan serta menerima perbedaan kepribadian, kemampuan dan perilaku bawahan. Sedangkan perilaku pemimpin yang berorientasi pada produksi memiliki kecenderungan penekanan pada segi teknis pekerjaan, pengutamaan penyelenggaraan dan penyelesaian tugas serta pencapaian tujuan. Pada sisi lain, perilaku pemimpin menurut model leadership continuum pada dasarnya ada dua, yaitu berorientasi kepada pemimpin dan bawahan. Sedangkan berdasarkan model grafik kepemimpinan, perilaku setiap pemimpin dapat diukur melalui dua dimensi, yaitu perhatiannya terhadap hasil/tugas terhadap bawahan/hubungan kerja.

Kecenderungan perilaku pemimpin pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari masalah fungsi dan gaya kepemimpinan.

### c. Teori Situasional

Keberhasilan seorang pemimpin menurut teori situasional ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan factor waktu dan ruang. Efektifitas kepemimpinan seseorang ditentukan oleh kemampuan “membaca” situasi yang dihadapi dan menyesuaikan gaya kepemimpinan agar cocok dengan dan mampu memenuhi tuntutan situasi tersebut. Penyesuaian gaya kepemimpinan dimaksud adalah kemampuan menentukan ciri kepemimpinan dan perilaku tertentu karena tuntutan situasi tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut berkembanglah model-model kepemimpinan berikut:

- 1) Model Continuum Otokratik-Demokratik Gaya dan perilaku kepemimpinan tertentu selain berhubungan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, juga berkaitan dengan fungsi kepemimpinan tertentu yang harus diselenggarakan. Contoh: dalam hal pengambilan keputusan, pemimpin bergaya otokratik akan mengambil keputusan sendiri, ciri kepemimpinan yang menonjol ketegasan disertai perilaku yang berorientasi pada penyelesaian tugas. Sedangkan pemimpin bergaya demokratik akan mengajak bawahannya untuk berpartisipasi. Ciri kepemimpinan yang menonjol disini adalah menjadi pendengar yang

baik disertai perilaku memberikan perhatian pada kepentingan dan kebutuhan bawahan.

- 2) Model “Interaksi Atasan-Bawahan” Menurut model ini, efektifitas kepemimpinan seseorang tergantung pada interaksi yang terjadi antara pemimpin dan bawahannya dan sejauh mana interaksi tersebut mempengaruhi perilaku pemimpin yang bersangkutan. Seseorang akan menjadi Pemimpin yang efektif apabila:
  - a) Hubungan atasan dan bawahan dikategorikan baik.
  - b) Tugas yang harus dikerjakan bawahan disusun pada tingkat struktur yang tinggi.
  - c) Posisi kewenangan pemimpin tergolong kuat.
- 3) Model Situasional Model ini menekankan bahwa efektifitas kepemimpinan seseorang tergantung pada pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat untuk menghadapi situasi tertentu dan tingkat kematangan jiwa bawahan. Dimensi kepemimpinan yang digunakan dalam model ini adalah perilaku pemimpin yang berkaitan dengan tugas kepemimpinannya dan hubungan atasan-bawahan. Berdasarkan dimensi tersebut, gaya kepemimpinan yang dapat digunakan adalah:
  - a) Memberitahukan,
  - b) Menjual
  - c) Mengajak bawahan berperan serta
  - d) Melakukan pendelegasian
- 4) Model “Jalan-Tujuan” Seorang pemimpin yang efektif menurut model ini adalah pemimpin yang mampu menunjukkan jalan yang dapat

ditempuh bawahan. Salah satu mekanisme untuk mewujudkan hal tersebut yaitu kejelasan tugas yang harus dilakukan bawahan dan perhatian pemimpin kepada kepentingan dan kebutuhan bawahannya. Perilaku pemimpin berkaitan dengan hal tersebut harus merupakan factor motivasional bagi bawahannya.

- 5) Model “Pemimpin-Peran serta Bawahan” Perhatian utama model ini adalah perilaku pemimpin dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan. Perilaku pemimpin perlu disesuaikan dengan struktur tugas yang harus diselesaikan oleh bawahannya. Salah satu syarat penting untuk paradigma tersebut adalah adanya serangkaian ketentuan yang harus ditaati oleh bawahan dalam menentukan bentuk dan tingkat peran serta bawahan dalam mengambil keputusan. Bentuk dan tingkat peran serta bawahan tersebut “didiktekan” oleh situasi yang dihadapi dan masalah yang ingin dipecahkan melalui proses pengambilan keputusan.

Tipe kepemimpinan Menurut Siagian (2013: 75) tipe kepemimpinan terdiri atas:

a. Otoraktis

Seorang pemimpin yang bersifat:

- 1) Menganggap organisasi milik sendiri
- 2) Mengidentikkan tujuan organisasi dengan tujuan organisasi
- 3) Menganggap bawahan sebagai alat semata
- 4) Tidak mau menerima kritik maupun saran



5) Terlalu tergantung pada kekuasaan formal

6) Dalam tindakan pergerakan menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan

b. Militeristik

Seorang pemimpin yang bersipat:

- 1) Dalam pergerakan bawahannya lebih menggunakan sistem perintah.
- 2) Dalam pergerakan bawahannya senang bergantung pada pangkat dan jabatan.
- 3) Senang pada formalitas yang berlebihan.
- 4) Menuntut disiplin yang kaku dari bawahannya
- 5) Tidak menerima kritik dari bawahannya.

c. Paternalistik.

Seorang pemimpin yang bersipat:

- 1) Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa.
- 2) Bersipat terlalu melindungi.
- 3) Jarang memberikjan kesempatan kepada baweahannya untuk mengambil inisiatif.
- 4) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk lebih kreatif.
- 5) Sering bersipat maha tahu.

d. Karismatik

Sampai saat ini belum ditemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki karisma, yang diketahui ialah bahwa pemimpin yang demikian memiliki daya tarik yang besar. Oleh karena itu, pada umumnya orang yang memiliki karisma mempunyai pengikut yang besar, meskipun para pengikut sering kali tidak dapat menjelaskan

mengapa mereka jadi pengikut. Dikatakan pemimpin yang karismatis itu diberkahi kekuatan gaib.

e. Demokratis. Seorang pemimpin bersifat:

- 1) Selalu berusaha mensinkronisasi antara kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi bawahannya.
- 2) Sering menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahannya.
- 3) Selalu mengutamakan kerja sama dengan teman kerja untuk mencapai tujuan organisasi.
- 4) Berusaha mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemimpin.

Menurut kartono indikator-indikator dalam kepemimpinan kepala desa yaitu:1. Komunikasi Komunikasi adalah inti dari semua hubungan social, apabila orang telah mengadakan hubungan komunikasi, maka apakah komunikasi yang mereka lakukan apakah sistem tersebut dapat mempererat atau mempersatukan mereka, mengurangi ketegangan, atau mempererat hubungan 2. Tanggungjawab Tanggung jawab adalah keadaan menanggung segala sesuatu, kewajiban, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatu dan juga menanggung akibatnya. 3. Keaktifan pemimpin Keaktifan yang dimaksud adalah bagaimana keaktifan seorang pemimpin dalam memberi pemahaman kepada masyarakat. Dalam hal ini kepala desa dituntut untuk aktif mengenai pajak di daerahnya yaitu dengan cara ikut berpartisipasi mengadakan masyarakat dengan memberikan informasi mengenai pentingnya membayar pajak untuk keberlangsungan bersama. 4. Motivasi Motivasi yang dimaksud adalah motivasi sebagai dorongan yang menyebabkan masyarakat masyarakat berusaha mencaoai tujuan, baik sadar atau tidak sadar. Dorongan itu pula yang menyebabkan masysrakat

berperilaku, yang dapat mengendalikan dan dapat memelihara kegiatan dan menetapkan arahan umum.

Jenis-jenis teori kepemimpinan sangat variatif dikemukakan dalam berbagai literatur, misalnya yang dikemukakan Salusu (2015), membagi teori kepemimpinan menjadi 8 (delapan) jenis yaitu: (1) Teori-teori besar (Great-Man Theories) Teori ini dipopulerkan pada 1840-an oleh penulis Skotlandia Thomas Carlyle, dan pada tahun 1860 Herbert Spencer merumuskan argumennya sehingga tetap berpengaruh sepanjang abad ke-20 sampai sekarang; (2) Teori Sifat (Trait Theories); (3) Teori Lingkungan (Environmental Theories); (4) Teori Situasional pribadi (Personal Situational Theories); (5) Teori Psikoanalitik (Psychoanalytic Theories); (6) Teori Antisipasi-Interaksi (Interaction-Expectation Theories); (7) Teori manusia (Humanistic Theories); (8) Teori Pertukaran (Exchange Theories).

### **3. Syarat-syarat Kepemimpinan**

Peran kepemimpinan signifikan berpengaruh memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan kelompok. Terdapat tiga syarat seorang pemimpin yang harus terjadi dalam interaksinya, yaitu: 1) menyebabkan terjadinya sesuatu, 2) perilaku pemimpin dan pengaruhnya dapat diamati, dan 3) terjadi perubahan yang nyata pada perilaku bawahannya (Syamsir Torang, 2013: 62). Menurut Kartini Kartono, konsep mengenai kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting:

- a) Keuasaan, ialah kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberi wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu

- b) Kewibawaan, ialah kelebihan, keunggulan, dan keutamaan, sehingga orang mampu mengatur orang lain kemudian orang tersebut patuh pada pemimpin, dan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan tertentu
- c) Kemampuan, ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin menurut Djatmiko adalah:

- a) Memiliki wawasan yang holistik, integral, dan komprehensif
- b) Merespon perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c) Inkuisitif (punya rasa ingin tahu dan mampu mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal organisasi)
- d) Kemampuan analitik
- e) Daya ingat yang kuat
- f) Kapasitas integrative (memahami seluruh kepentingan organisasi dan tidak terbatas pada kepentingan satuan kerja)
- g) Komunikatif (secara vertikal maupun horizontal)
- h) Mendidik (memberikan bimbingan dan pengarahan)
- i) Rasionalitas (situasional dan rasional)
- j) Obyektif
- k) Pragmatisme (sikap idealistik dan memiliki idealisme)
- l) Kemampuan menentukan skala prioritas
- m) Kemampuan membedakan yang urgen

- n) Secara naluriah dapat menentukan kapan bertindak dan kapan tidak
- o) Rasa kohesi (menjaga dan memelihara keutuhan kelompok)
- p) Naluri relevansi (mampu mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan usaha pencapaian tujuan organisasi)
- q) Teladan
- r) Menjadi pendengar yang baik
- s) Adaptabilitas
- t) Fleksibilitas
- u) Tegas
- v) Orientasi masa depan
- w) Antisipatif (Torang, 2013: 63).

Kemudian Permadi (1996: 17-20) juga menyebutkan syarat-syarat kepemimpinan menurut beberapa tokoh, yaitu:

- a) Stogdill Dalam bukunya *Personal Factors Associated With Leaderships* yang dikutip A. Lee dalam bukunya *Management Theories and Prescription* menyatakan, bahwa pemimpin itu harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu:
  - 1) Kapasitas, meliputi: kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara (verbal facility), keaslian, dan kemampuan menilai.
  - 2) Prestasi/achievement, meliputi: gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olah raga dan atletik, dan lain-lain.
  - 3) Tanggung jawab, meliputi: mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan hasrat untuk unggul.

- 4) Partisipasi, meliputi: aktif memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif atau serba bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, dan punya rasa humor.
  - 5) Status, meliputi: kedudukan sosial ekonomi cukup tinggi, populer, dan tenar.
- b) Prof. Dr. Mar“at Pada dasarnya deskripsi tingkah laku seorang pemimpin disebut leadership traits. Pada umumnya faktor-faktor yang akan dipertimbangkan adalah:
- 1) Keadaan fisik dan konstitusional, misalnya berat badan, tinggi badan, tubuhnya, energinya, kesehatan, dan penampilan.
  - 2) Kecerdasan.
  - 3) Kepercayaan diri.
  - 4) Penyesuaian diri.
  - 5) Kemampuan yang meliputi inisiatif dan ambisinya.
  - 6) Memiliki kepribadian yang penuh optimisme, dapat mengungkapkan sesuatu secara baik, memiliki originalitas, keterbukaan, gembira, dan merasa dirinya yakin.
  - 7) Sifat-sifat situasional yang berarti partisipasi sosial dalam situasi apa pun dapat menyesuaikan.
- c) Winardi, S.E Sejumlah sifat karakterologis yang diperlukan sebagai seorang pemimpin:
- 1) Memiliki keanekaragaman kemampuan.
  - 2) Memiliki inisiatif.
  - 3) Materialisme.

- 4) Rangsangan ekspansi.
- 5) Kemampuan untuk meneruskan sesuatu
- 6) Percaya diri.
- 7) Bertanggung jawab dan identifikasi.
- 8) Memiliki keinginan untuk adanya keteraturan.
- 9) Memiliki sifat luwes.

Sedangkan konsep kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara meliputi: “*Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*”. Secara harfiah dapat diartikan sebagai berikut : “Di depan memberikan contoh dan teladan, di tengah memberi semangat dan motivasi, di belakang memberi dorongan dan bimbingan”. Konsep yang sudah berumur puluhan tahun ini ternyata masih relevan diterapkan dalam gaya kepemimpinan saat ini (Rivai, 2012).

## **2.2. Gaya Kepemimpinan**

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat seseorang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia inginkan. Gaya kepemimpinan dalam setiap organisasi sangat di perlukan untuk mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun iklim motivasi bagi karyawan sehingga diharapkan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Harold W. Boles dan James A. Davenport (dalam Wirawan, 2013) mengatakan bahwa istilah gaya pemimpin bukan gaya kepemimpinan, menurut mereka pemimpinlah yang menunjukkan gaya bukan proses kepemimpinan. Istilah lain yang banyak dipergunakan oleh

para peneliti adalah perilaku kepemimpinan atau leadership behavior. Dalam memimpin para pengikutnya, pemimpin mempergunakan perilaku tertentu yang berbeda satu pemimpin dengan pemimpin lainnya. Sementara itu, Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Wirawan, mengatakan bahwa pada awalnya istilah *the style of leader*, akan tetapi kemudian menggunakan istilah *leadership style*.

Penelitian-penelitian yang bersumber pada pandangan gaya kepemimpinan umumnya memusatkan perhatian mereka pada perbandingan antara gaya deokratis dan gaya otokratik. Gatto (dalam Salusu, 2015) mengategorikan gaya kepemimpinan ke dalam 4 macam: Direktif, konsultatif, partisipatif, dan gaya delegasi.

Karakteristik dari setiap gaya tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- a. Gaya direktif: Pemimpin yang direktif pada umumnya membuat keputusa-keputusan penting dan banyak terlibat dalam pelaksanaannya. Semua kegiatan terpusat pada pemimpin. Dan sedikit sekali kebebasan bagi bawahan untuk berkreasi. Pada dasarnya gaya direktif adalah gaya otoriter.
- b. Gaya konsultatif: gaya ini dibangun di atas gaya direktif. Kurang otoriter dan banyak melakukan interaksi dengan para staf dan anggota organisasi/ bawahan. Fungsi pemimpin lebih banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, memberi nasehat dalam rangka mencapai tujuan.



- c. Gaya partisipatif: gaya ini bertolak dari gaya konsultatif yg bisa berkembang ke arah saling percaya antara bawahan dengan pemimpin. Pemimpin cenderung memberi kepercayaan pada kemampuan staf untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sebagai tanggungjawab mereka.
- d. Gaya delegasi: disebut juga gaya Free-rein. Yaitu gaya yang mendorong kemampuan staf untuk ambil inisiatif. Kurang interaksi dan control yang dilakukan oleh pemimpin, sehingga gaya ini hanya bisa berjalan apabila staf memperlihatkan tingkat kompetensi dan tanggungjawab yang tinggi.

Menurut H. Joseph Reitz (dalam Rahayu dkk, 2017:11) dalam melaksanakan aktivitas pemimpin ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, yaitu:

- a. Kepribadian (*personality*), yaitu pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin, hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan.
- b. Harapan dan perilaku atasan kepada para bawahan atau karyawannya.
- c. Karakteristik, yaitu harapan dan perilaku bawahan yang mempengaruhi pimpinan terhadap bentuk seperti apa gaya kepemimpinan yang dipakai.
- d. Kebutuhan tugas, yaitu setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan seorang pemimpin.
- e. Iklim dan kebijakan organisasi akan dapat mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan.
- f. Harapan dan perilaku rekan kerja akan dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan.

## 2.3. Desa dan Pembangunan

### 2.3.1 Pengertian dan Sejarah Desa

Desa sejak zaman dahulu menurut hukum adalah "*collegial*" dimana desa merupakan daerah otonomi yang paling tua dimana lahir sebelum munculnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum adanya kerajaan (negara) sehingga desa memiliki otonomi yang penuh dan asli (Syamsu, 2008:34)

Menurut Zoetmulder dalam Syarifuddin (2010:12) menyebutkan bahwa desa secara epistemology berasal dari kata "*Swadesi*" yang berasal dari Bahasa sangsekerta yang memiliki arti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom, begitupun dengan istilah atau penamaan desa yang tidak sama di beberapa wilayah Indonesia.

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata "Desa" memiliki arti kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seseorang kepala desa)

Sukandar Wiratmadja (1984:40) mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pendapat Sukandar Wiratmadja mengenai definisi desa didukung dengan pengertian desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.

Sejalan dengan itu, B.N Marbun (1980:20) mengatakan bahwa desa merupakan suatu daerah hukum yang sejak beberapa turunan mempunyai

beberapa turunan-turunan ikatan kekeluargaan atau ikatan social yang hiduo serta tinggal menetap disuatu daerah tertentu dengan adat istiadat yang dijadikan dasar hukum dan mempunyai seorang pemimpin formal yaitu kepala desa.

Nyoman (1982:26) mengemukakan bahwa desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan berdama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan berbagai usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam.

Secara historis desa merupakan akal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum Negara ini terbentuk, struktur sejenis desa, masyarakat adat dan budaya telah menjadi institusi social yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diartikan Sebagai:

*"Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatua Republik Indonesia".*

Desa merujuk pada satuan wilayah dibawah kecamatan. Dilihat dari aspek kependudukan, desa memiliki jumlah penduduk yang absolut dan lebih rendah dibandingkan dengan kelurahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, beberapa persyaratan sebuah desa yang tercantum dalam pasal 8 yaitu pertama, memiliki wilayah kerja dengan akses transportasi antar wilayah, kedua, kondisi sosial budaya yang mampu menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa. Ketiga, memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung serta keempat, batas wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan Bupati dan atau Walikota.

Dalam lingkungan desa terdapat beberapa lembaga yang harus dimiliki desa yaitu sebagai berikut:

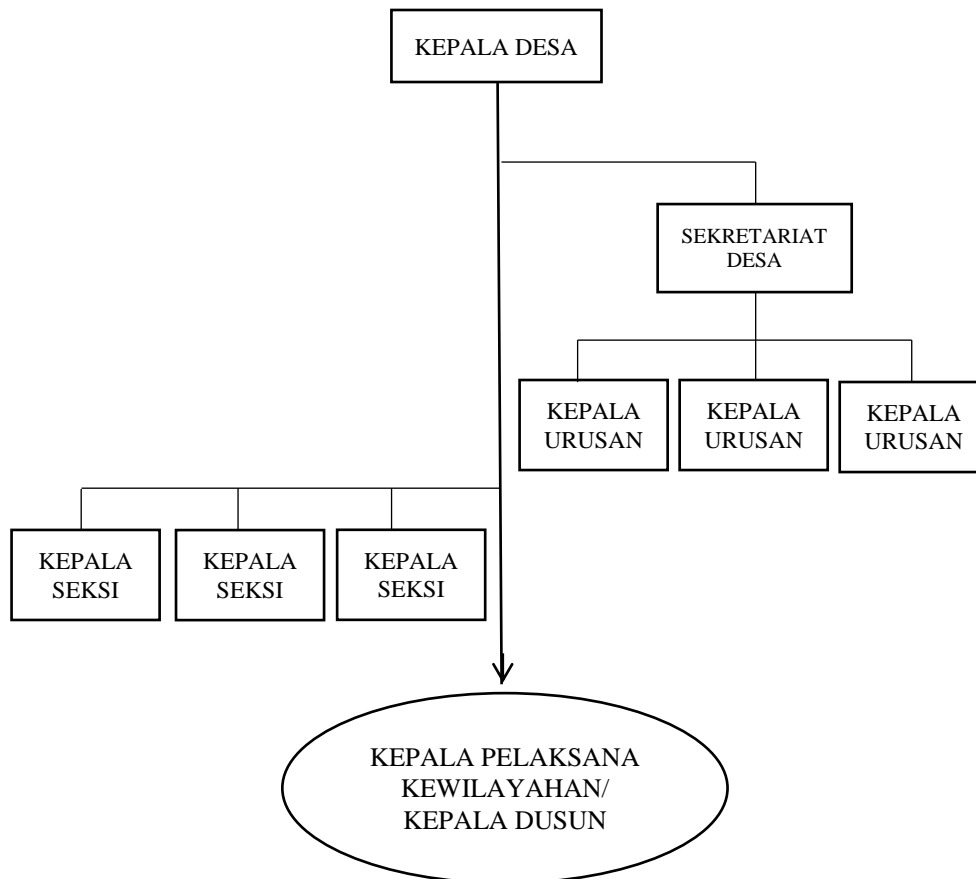
#### 1. Perangkat Desa

Ilmar (2013:60), menguraikan bahwa dalam bidang pemerintahan, kemampuan pemerintah, khususnya kemampuan seorang pemimpin yang akan menjalankan dan menyelenggarakan jalannya roda pemerintahan tentunya tidak hanya mempunyai kemampuan dan kompetensi yang sangat baik atau lebih dari cukup untuk mengelola dan mengatur pemerintahan, akan tetapi dibutuhkan sebuah landasan yang kokoh dan kuat berupa paradigm atau sebuah patokan (ukuran) yang nantinya diharapkan mampu membawa kearah dan tujuan pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, struktur organisasi pemerintah desa sebagai berikut:

## BAGAN 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

### SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



*(Permendagri No. 84 Tahun 2015)*

Setiap perangkat desa yang ada dalam struktur organisasi tersebut memiliki masing-masing tugas pokok dan tanggung jawab dalam membantu pemerintah desa dalam hal ini kepala desa menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai selama satu periode pemerintahan.

## 2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah representasi perwakilan masyarakat ditingkat desa. Sebagai salah satu bentuk perwujudan demokrasi

ditingkat desa. BPD dapat dikatakan "Parlemen"-nya desa, diaman BPD merupakan lembaga baru di era otonomi daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan desa. Keberadaan BPD dalam pemerintah desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintah.

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menempatkan desa sebagai subyek pembangunan, sehingga membuat peran BPD menjadi sangat penting,

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menguraikan bahwa BPD adalah merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55 menguraikan fungsi BPD adalah sebagai berikut:

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Melihat ketiga point diatas, dapat disimpulkan bahwa peran BPD sangat besar dalam proses-proses pembangunan di tingkat desa, selain bertindak sebagai lembaga legislasi ditingkat desa, juga berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta fungsi pengawasan,

### 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa merupakan salah satu organisasi yang dibentuk atas inisiasi dan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, diuraikan bahwa lembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Padal Pasal 4 ayat (1&2), Permendagri No. 18 tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa Memiliki Tugas dan Fungsi sebagai Berikut :

#### 1. Tugas LKD

- a) Melakukan pemberdayaan masyarakat desa
- b) Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- c) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa

#### 2. Fungsi LKD

- a) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
- c) Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa.
- d) Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

- e) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan parakarsa, partisipasi swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f) Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

Dengan adanya LPM ditingkat desa, diharapkan mampu menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ditingkat desa yang bertujuan memberdayakan masyarakat yang ada di desa.

### **2.3 Pembangunan**

Pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005:85). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan system dunia (world system theory) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994:70). Sedangkan Tikson (2005:85) membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu



kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005:72).

Siagian (1994:122) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju rangka pembinaan bangsa (nation Ginanjar Kartasasmita (1994:170) modernitas dalam building)". Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994:170) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana".

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005:23).

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994:20). Portes (1976:70) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial

dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005:112) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan adanya diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005:112).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi moder, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa

pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

## 2. Kebijakan keterbukaan Informasi Publik

Reformasi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan pada Indonesia. Dari latar belakang pemerintahan yang tertutup dan penuh kerahasiaan tersebut perbaikan dan perubahan kearah pemerintahan yang lebih baik terus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Menurut Erlina Hasan (2010:118) berkembangnya semangat keterbukaan dalam masyarakat setidaknya dipandu oleh kecanggihan sistem komunikasi dan informasi dimana masyarakat dengan mudah mengakses berbagai permasalahan, khususnya bidang pemerintahan dari berbagai belahan dunia yang secara tidak langsung membuka mata dan telinga bagaimana negara lain mengelola dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik.

Tujuan diundangkannya Keterbukaan Informasi Publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik, mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar serta

mengembangkan sistem dokumentasi yang baik untuk penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara efektif dan efisien. Disamping itu tujuannya sesuai undangundang adalah :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi diligkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Di Indonesia keterbukaan informasi publik mulai menjadi perhatian sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam regulasi ini, dijelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Di Kabupaten Soppeng penerepan kebijakan keterbukaan Informasi Publik diatur Dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 61 Tahun 2020, peraturan ini yang dijadikan acuan oleh seluruh pemerintah kabupaten Soppeng dalam Menerapkan atau Mengimplementasikan Kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

#### **2.4. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membandingkan kenyataan yang ada di lapangan dengan teori yang relevan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu sebagai berikut:

##### **1. Sukmawati (2010)**

Penelitian terdahulu yang ditulis Sukmawati (2010) “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Sma Muhammadiyah 3 Tangerang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk studi kasus yang dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam mengenai situasi dan makna sesuatu atau objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yaitu teknik wawancara terstruktur dan observasi tidak terlibat (non partisipan). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dan observasi maka diperoleh gaya kepemimpinan pada kepala sekolah SMA Muhammadiyah 3 Tangerang adalah gaya kepemimpinan executive dimana memiliki ciri-ciri memberikan semangat yang tinggi kepada bawahan dengan contoh moral yang tinggi, mempertahankan orang lain sesuai dengan sifat masing-masing dan memandang orang sebagai teman kerja yang penting, dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang baru dan memandang konflik sebagai hal yang wajar.

## 2. Kartina (2011)

Penelitian terdahulu yang ditulis Kartina (2011) yang berjudul “Analisis Gaya Kepemimpinan Lurah Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur”. Jenis Penelitian: penelitian yang dilakukan adalah Penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh 17 orang responden yang merupakan keseluruhan pegawai yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang berada di kantor Kelurahan Batu IX (Sembilan) Kota Tanjungpinang. Dari 17 responden tersebut dapat penulis jabarkan 7 indikator pertanyaan mengenai gaya kepemimpinan untuk melihat gaya kepemimpinan mana yang lebih dominan yang menjadi ciri khas dari gaya kepemimpinan Lurah Batu IX (Sembilan) dan dari data-data tersebutlah maka akan penulis paparkan hasil penelitian yang akan dijelaskan dalam 3 dimensi penelitian dengan masing-masing indikator penelitian. Berdasarkan hasil Analisa terhadap gaya kepemimpinan Lurah Batu IX (Sembilan) dapat diambil kesimpulan bahwa Lurah Batu IX (Sembilan) cenderung kepada gaya kepemimpinan demokratis di mana gaya kepemimpinan demokratis diwarnai dengan usaha mewujudkan dan mengembangkan hubungan manusiawi (Human Relationship) yang efektif, berdasarkan prinsip saling menghormati dan menghargai antara satu dan lainnya.

## 2.5. Kerangka Pikir

Dalam hal penelitian yang akan dilakukan ada beberapa hal pokok yang mendasari alur berpikir yang kemudian perlu untuk menjelaskan mengenai permasalahan dan tujuan penelitian oleh karna itu dibuatlah skema penelitian berikut:

Bagan 2. Kerangka Pikir

